



SELASA, 17 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL NEGATIF

SUMBER BERITA

• RAKYAT BENGKULU	X	• MEDIA INDONESIA	
• BENGKULU EKSPRESS		• KOMPAS	
• RADAR BENGKULU		•	

Desak Kejari Tuntaskan Perkara Korupsi

BENGKULU - Puluhan aktivis DPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Bengkulu, kemarin (16/4) sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi kantor

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Kedatangan para aktivis PP Kota Bengkulu ini bertujuan untuk mendesak Kejari Bengkulu untuk segera menuntaskan perkara korupsi yang ada di Kota Bengkulu, khususnya yang saat ini tengah ditangani oleh Kejari Bengkulu. Yakni dugaan penyelewengan

aliran dana tunjangan Beban Kerja (BK) di BPKAD Kota Bengkulu tahun 2015.

Para aktivis mendesak Kejari Bengkulu untuk segera menuntaskan perkara tersebut dan menangkap aktor intelektual atas kasus itu. Pasalnya, selain ada dugaan penyelewengan tunjangan BK, disinyalir juga ada penyelewengan aliran atas pagu anggaran dari

tunjangan BK yang dianggarkan dalam APBD 2015 tersebut.

"Penyidikan perkara ini sudah berlangsung lama, namun belum ada kejelasan mengenai status hukumnya. Kita mendesak Kejari Bengkulu untuk bisa menuntaskan perkara ini dan menangkap aktor intelektual atas perkara ini," ungkap Orator Aksi, Deno Andeska.

Tak hanya itu, massa aksi pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut melakukan supervisi dalam kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejari Bengkulu. Selain itu massa juga meminta Jamwas dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pengawasan internal terhadap jaksa yang menangani perkara ini.

"Ini merupakan bentuk ketidakpuasan kami karena lambannya kinerja Kejari Bengkulu dalam menyelesaikan perkara ini," bebernya.

Selanjutnya, setelah melakukan orasi kurang lebih 40 menit, pihak Kejari Bengkulu mengizinkan beberapa perwakilan dari massa aksi untuk melakukan diskusi bersama. Dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Oktalian Darmawan,

SH sebanyak 7 orang perwakilan massa PP Kota Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PP Kota Bengkulu, Oktariandi Erlan, berkumpul di aula Kejari Bengkulu.

Dalam dialog tersebut, Oktalian menjelaskan bahwa untuk kasus DP-PA pihaknya sudah meminta audit di BPKP Provinsi Bengkulu. Hasil audit sementara diduga ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil audit riil dari BPKP Provinsi Bengkulu.

"Semua langkah dan upaya terus kita lakukan dalam penuntasan kasus ini, dan saat ini perkara ini sudah masuk dalam tahapan akhir. Tinggal kita menunggu hasil audit riil dari BPKP yang kemudian baru akan kita lakukan gelar perkara untuk hasil keseluruhan dari penyidikan yang dilakukan selama ini," jelasnya. (sly)